

## **BAB II**

### **INDUSTRIALISASI DAN KAPITALISASI NOVEL SERTA FEMINISME DI INDONESIA**

Novel merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa imajinatif yang mengisahkan sebuah problematika dalam kehidupan seorang atau beberapa tokoh secara utuh. Kisah yang diceritakan dalam novel berangkat dari kemunculan masalah hingga resolusi atau penyelesaian masalah tersebut (Kosasih, 2008:54). Novel juga merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang menggunakan bahasa sebagai komponen yang dinamis dan unik yang didalamnya sarat akan nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, agama, hingga pendidikan (Salleh et al., 2020:46). Dalam menarik khalayak, novel menjadi salah satu media dalam komunikasi massa yang tidak terlalu bergantung pada media massa lainnya. Akan tetapi, ide-ide baru yang menantang dari novel dapat menarik khalayak tertentu menggunakan cara yang berbeda dari media-media massa lainnya (Baran, 2019:123). Sebagai bagian dari media massa, novel dapat menjadi saran untuk menyebarkan informasi, menjadi institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia, serta memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya genre novel di era modern, seperti isu-isu sensitif, kelompok-kelompok marginal, hingga isu kelompok-kelompok berperilaku menyimpang.

#### **2.1 Industrialisasi Novel di Indonesia**

##### **2.1.1 Sejarah Penerbitan Buku di Indonesia**

Lahirnya karya sastra novel tidak lepas dari peran revolusi industri maupun sejarah industri penerbitan buku. Di Indonesia, industri penerbitan buku telah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Diawali dari para ahli penerbitan asal Belanda yang datang ke Indonesia pada pertengahan abad ke 17. VOC yang kala itu masih menduduki wilayah Indonesia melihat adanya prospek yang cukup baik dari industri ini, sehingga VOC tertarik untuk membangun penerbitan dan percetakan di berbagai daerah kekuasaannya. Industri percetakan berkembang dengan pesat, hingga pada tahun 1809, dua perusahaan percetakan bergabung menjadi satu dengan nama *New Government Printing Office* atau yang saat ini dikenal dengan Percetakan Negara. *New Government Printing Office* bertugas untuk mencetak berita-berita resmi kenegaraan atau yang dikenal sebagai *Bataviasche Koloniale Courant*. Setelah kemerdekaan Indonesia, didirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Penerbit Nasional pada 7 September 1945. Buku-buku yang diterbitkan pada masa ini kebanyakan adalah buku-buku sastra (Yusriana, 2014:45-46). Saat ini industri penerbitan buku terbesar dimiliki oleh perusahaan Gramedia yang telah menjalin kerja sama dengan banyak penerbit buku di dalam maupun di luar negeri. Gramedia juga menjadi penerbit buku yang konsisten menerbitkan berbagai macam buku, baik fiksi maupun nonfiksi. Sebagian besar buku terbitan Gramedia menjadi buku *best seller* di Indonesia, seperti *Cantik Itu Luka* karya Eka Kurniawan, *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, hingga *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* karya Dian Purnomo.

Meskipun kondisi penerbitan di Indonesia berjalan cukup baik setelah Indonesia merdeka, minat baca masyarakat Indonesia masih dikatakan rendah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2022 lalu mendapati bahwa Indonesia berada di peringkat 11 terbawah dari 81 negara (Kemendikbud, 2023). Di sisi lain, dilansir dari Kompas.com, data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, yang berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca (Caesaria & Kasih, 2023). Hal ini diperparah dengan jumlah judul buku yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia yang masih jauh dibawah rata-rata. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), terdapat disparitas antara perusahaan penerbit kecil dan besar. Jika perusahaan penerbitan raksasa Gramedia bisa menerbitkan 4.000 judul per tahun, perusahaan penerbit kecil hanya menerbitkan paling banyak 10 judul buku pertahun (IKAPI, 2020). Keadaan penerbitan Indonesia semakin terpuruk ketika pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dimana jumlah buku yang diterbitkan untuk tujuan komersial semakin terbatas. Hal ini pun berdampak pada penjualan buku yang mengalami penurunan signifikan.

| TAHUN | JUDUL BARU |
|-------|------------|
| 2015  | 15,698     |
| 2016  | 15,881     |
| 2017  | 15,485     |
| 2018  | 14,925     |
| 2019  | 13,822     |
| 2020  | 6,587      |

Gambar 2.1 Jumlah buku yang didistribusikan melalui toko buku Gramedia

*Sumber: Ikatan Penerbit Indonesia*

Lebih lanjut, riset IKAPI juga menunjukkan rata-rata buku yang dicetak di Indonesia terbatas di angka 3.000 eksemplar untuk setiap judulnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun peminat buku masih sangat sedikit, dimana rata-rata masyarakat Indonesia hanya membeli 2 judul buku setiap tahunnya. Di samping itu, dilansir dari VOA Indonesia, dari 1.300 perusahaan penerbitan, hanya separuhnya yang masih aktif. Sebab, penerbit yang dikatakan aktif adalah penerbit yang mampu menerbitkan minimal 10 buku setiap tahunnya (Sucahyo, 2018). Tidak hanya itu, harga buku di Indonesia dikategorikan mahal jika dibanding dengan negara-negara lain. Dalam laman Twitter-nya, penulis tanah air Eka Kurniawan menyebut bahwa harga buku yang mahal dikarenakan beberapa faktor, seperti potongan toko buku, pajak pertambahan nilai (PPN) kertas, pajak penghasilan (PPh) penulis, editor, hingga desainer, royalti penulis, belum lagi biaya produksi dan distribusi.

### **2.1.2 Perkembangan Sastra Baru Indonesia dan Gaya Kepengarangan Penulis Perempuan**

Tonggak sastra baru Indonesia dimulai pada periode 1920-1930an. Kelahiran karya sastra pada tahun ini disebut sebagai Angkatan '20-an atau Angkatan Balai Pustaka. Julukan ini banyak digunakan karena pada saat itu banyak karya sastra yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Beberapa karya sastra yang mengawali periode ini adalah novel *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar dan novel populer *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli. Ciri yang ditonjolkan dari novel pada periode ini adalah menceritakan kesetiaan istri kepada suami, orang tua, adat, ataupun kisah tentang pentingnya belajar. Tumbuhnya sikap individualis dan dinamis, mengawali

kemunculan karya sastra Angkatan'30 atau yang juga dikenal dengan sebutan Angkatan Pujangga Baru. Periode ini, pengarang tidak lagi terlalu memerdulikan tradisi sebagai tema sentralnya. Sebab, pada era ini, pandangan yang dimiliki oleh pengarang lebih maju dan modern. Sebagai gantinya, karya sastra periode ini kental dengan semangat nasionalisme. Tahun 1945 mengawali karya sastra Angkatan '45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Karakteristik yang ditonjolkan oleh angkatan ini adalah karya sastra yang bebas, individualistik, universalistik, dan realistik. Menyusul Chairil Anwar, H.B Jassin mengawali Angkatan '66 lewat bukunya yang bertajuk "*Angkatan '66*". Periode ini merupakan respon para pengarang atas kondisi politik Indonesia yang kacau dan penuh terror. Akibatnya, sebagian besar karya sastra yang diterbitkan di era ini bernada protes terhadap kondisi sosial dan politik pemerintahan Indonesia. Mansur Samin, Bur Rasuanto, dan Taufik Ismail merupakan salah tiga sastrawan Angkatan '66. Baru di tahun 1970an, karya sastra kontemporer masuk sebagai semangat *avant-garde* bagi dunia sastra Indonesia. Sebagian besar karya sastra era ini menekankan pada makna kata, beraliran surealis, absurd, menonjolkan tatanan sehari-hari (keluarga, ritual, kepercayaan, atau kebiasaan). Selain Sutardji Calzoum Bachri sebagai pelopor Angkatan '70, sastrawan yang populer di era ini adalah Putu Wijaya, Budi Darma, hingga Sapardi Djoko Damono. Sastrawan perempuan mulai dikenal pada periode 1980, dimana sastra saat itu masih bergumul pada persoalan nilai tradisional dan modern. Dua sastrawan perempuan yang cukup terkemuka pada era ini adalah Mira W. dan Marga T. yang dikenal dengan novel-novel fiksi romantis dengan perempuan sebagai tokoh utamanya. Pramoedya Ananta Toer dengan novel tetralogi Pulau

Buru dan Ahmad Tohari dengan novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ikut mengawali periode Angkatan '80 ini. Berbeda dengan Mira dan Marga yang banyak menerbitkan fiksi romantis, kedua sastrawan tersebut masih berkuat pada persoalan agama, kekerabatan, kepercayaan, dan ritual. Disamping itu, bermunculan juga novel populer bergenre pop remaja yang diinisiasi oleh Hilman Hariwijaya melalui novelnya *Lupus*. Reformasi pun kemudian membawa kembali karya sastra yang berwarna sosial dan politik. Sastrawan era ini seperti Ahmadun Yosi Herfanda dan Acep Zamzams Noer yang turut meramaikan dengan karangan-karangan bertema sosial-politik mereka.

Pasca reformasi, tepatnya periode 2000-an merupakan era penulis perempuan. Karya sastra perempuan yang lahir di masa ini mengangkat tema dan ideologi yang berani, terbuka, dan vulgar. Salah satu pengarang perempuan yang mengawali tren ini adalah Ayu Utami lewat karyanya *Saman*. Penulis perempuan, terutama pada periode ini dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebanyakan penulis laki-laki, sama halnya dengan gaya bahasa antara laki-laki dan perempuan yang komunikasi sehari-hari. Perbedaan ini juga ditunjukkan melalui pemilihan topik komunikasi, penggunaan diksi, intonasi, penggunaan kata-kata vulgar dan penghinaan (sumpah serapah). Dalam karya sastra, kebanyakan penulis perempuan tidak hanya mengekspresikan pemikirannya, tetapi juga berusaha menunjukkan femonema ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kritik dalam karya sastra pun menjadi salah satu metode yang digunakan oleh para penulis perempuan untuk memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap isu perempuan, seperti marginalisasi, diskriminasi, ataupun pembatasan kebebasan perempuan

melalui adat istiadat. Beberapa karakteristik yang ditunjukkan oleh para penulis perempuan dapat dijumpai dari penggunaan bahasa dalam karya sastra, seperti gaya bahasa vulgar (kata-kata kasar, porno, dan tabu). Penggunaan kata-kata vulgar dalam karya sastra menjadi upaya penulis perempuan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat dan mengupayakan kesetaraan gender bagi perempuan. Tak jarang penulis perempuan menambahkan unsur seksualitas dalam karya sastra mereka untuk menunjukkan realita kehidupan perempuan dalam sektor politik, sosial, hingga budaya dan adat istiadat. Beberapa penulis perempuan yang turut mengikuti jejak Ayu Utami, antara lain Djenar Maesa Ayu, Nova Riyanti Yusuf, dan Dee Lestari. Selain seksualitas, penulis perempuan juga dikenal dengan ciri khasnya karena penggunaan kosakata bahasa daerah, gaya bahasa populer atau gaul, ataupun penggunaan istilah-istilah saintifik. Salah satu penulis yang mengadopsi gaya bahasa saintifik ini adalah Dee Lestari dalam novelnya *Supernova*. Tak jarang penulis perempuan juga menyelipkan gaya bahasa yang mengandung pengulangan kata dalam struktur gramatikalnya, penggunaan satire atau sindiran, sinisme, paradoks, sarkasme, hiper (gaya bahasa yang berifat berlebihan), majas sinisme, dan gaya kepenulisan fantasi (sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada dalam alam manusia). Salah satu pengarang perempuan yang dikenal dengan gaya kepenulisan fantasi adalah Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dalam beberapa karya sastranya seperti *Semua Ikan di Langit* dan *Kita Pergi Hari Ini*.

### **2.1.3 Kritik Sastra Feminis**

Kritik sastra feminis pertama kali muncul pada tahun 1700-an di Amerika Serikat melalui gerakan feminisme dan dorongan kekuatan modernisasi yang kuat, dimana

perempuan yang berasal dari kelas dan ras yang berbeda masuk dalam kekuatan publik dan proses politik (Asfar, 2015:20). Dalam kritik sastra feminis, pengkritik melihat karya sastra dengan suatu kesadaran khusus, dimana kesadaran ini menunjukkan bahwa jenis kelamin banyak berkaitan dengan kehidupan manusia, mulai dari budaya hingga sastra. Adanya jenis kelamin menyebabkan munculnya perbedaan pemikiran pengarang, pembaca, perwatakan, hingga faktor eksternal yang memengaruhi situasi karya sastra. Kritik sastra feminis dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menyatukan pendirian bahwa perempuan mampu membaca sebagai perempuan, mengarang sebagai perempuan, dan menafsirkan sastra sebagai perempuan (Sugihastuti & Suharto, 2015:5-6). Kritik sastra feminis juga berusaha untuk berfokus pada representasi perempuan dalam kesastraan melalui upaya pembebasan perempuan dari dominasi patriarki. Selain mendeskripsikan bentuk penindasan terhadap perempuan dalam karya sastra, kritik sastra feminis juga bertujuan untuk menghubungkan dan menganalisis relasi gender atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang dikonstruksi secara sosial (Wiyatmi, 2012:11). Perempuan menjadi pusat dalam kritik sastra feminis. Kritik dapat dikatakan sebagai feminis apabila terdapat kritik tentang disiplin ilmu, paradigma tradisional tentang perempuan, sifat atau peran sosial, maupun mendokumentasikan karya sastra orang lain berdasarkan sudut pandang perempuan. Kritik sastra feminis juga dapat dilakukan dengan menempatkan karya sastra atau literatur perempuan sebagai sebuah bidang khusus. Dalam hal ini, semua kritikus sastra feminis sepakat bahwa evaluasi konsep, sejarah, dan politik dalam hal gender dapat membantu menciptakan lanskap sastra yang baru (Humm, 2003: 51).



Pada tahun-tahun awal, kritik sastra feminis lebih berfokus pada upaya untuk mengungkapkan misogini dan terdapat dalam sastra, seperti penggambaran perempuan sebagai malaikat atau monster dalam karya sastra, adanya unsur pelecehan perempuan dalam sastra klasik maupun populer, serta praktik pengucilan perempuan dari sejarah kesastraan. Tak hanya itu, para kritikus sastra feminis juga memfokuskan pada hubungan antara sastra dan perlakuan buruk yang dialami perempuan, seperti pornografi dan pemerkosaan. Setelah melewati masa awal perkembangan kritik sastra feminis, para penulis perempuan memiliki peluang untuk menciptakan literatur mereka sendiri yang sebelumnya dibatasi oleh nilai-nilai patriarki yang mendominasi budaya (Showalter, 1985:5-6). Dalam hal ini, kritik sastra feminis memperlihatkan bahwa pembaca dan penulis perempuan dapat menciptakan persepsi dan ekspektasi yang berbeda terhadap pengalaman mereka. Melalui kritik sastra feminis, perempuan juga dapat menceritakan kisah-kisah penting mereka dalam budayanya. Tak hanya itu, para kritikus sastra feminis berhasil menciptakan sejarah baru dalam kesastraan penulis perempuan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki cara menulis dan strategi membaca yang berbeda, serta melibatkan genre fiksi ilmiah untuk memperluas definisi sastra (Humm, 2003:153). Keberanian para kritikus sastra feminis juga ditunjukkan dengan aksi mereka membongkar seksisme dalam karya sastra dan mendorong lahirnya perubahan terhadap konsep-konsep dalam sejarah sastra atau memulai babak baru dalam perkembangan sastra perempuan (Showalter, 1985:145-146).

Para tokoh feminis yang dikenal gigih dalam menciptakan sejarah bagi perempuan dalam sastra antara lain seperti Julia Kristeva, Luce Irigaray, Hélène

Cixous, Monique Wittig. Keempatnya sama-sama mengkritik budaya Barat yang menindas dan bersifat phallogosentris. Akan tetapi, mereka memiliki cara yang berbeda dalam melakukan resistensi atau resistensi. Salah satunya adalah Hélène Cixous yang teorinya *écriture féminine* digunakan dalam penelitian ini. Cixous menekankan bahwa dominasi laki-laki telah membatasi perempuan untuk mengekspresikan seksualitasnya untuk dirinya sendiri. Sebab, selama ini perempuan merupakan objek seksual laki-laki yang diberikan pilihan seperti perawan atau pelacur dan istri atau ibu. Oleh karena itu, Cixous mendorong perempuan untuk dapat mengungkapkan hal tersebut ke dalam bahasa mereka sendiri yang lepas dari konsep dan kontrol phallogocentris (Showalter, 1985:362). Di Indonesia, ekspresi seksualitas perempuan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cixous mulai ditunjukkan oleh para penulis perempuan sebagai bentuk pemberontakan mereka terhadap karya sastra misoginis. Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, Dee Lestari, hingga Nova Riyanti menjadi penulis perempuan yang mengambil langkah ini, yang kemudian dikenal sebagai penulis sastra wangi.

Sastra wangi merupakan istilah yang digunakan untuk mengkategorikan karya sastra perempuan yang ditulis oleh para sastrawan. Mengutip dari BBC News, sastra-wangi merupakan sebutan yang dicetuskan oleh media setelah terbitnya banyak karya sastra yang merupakan karangan dari perempuan-perempuan muda dan cantik yang diluncurkan di kafe (Lipscombe, 2003). Istilah sastra wangi mulai dikenal publik setelah Dewi Lestari menerbitkan *Supernova* dan Djenar Maesa Ayu meluncurkan *Menyusu Ayah*, menyusul karya terkenal dan fenomenal Ayu Utami, *Saman*. Mereka itulah yang disebut sebagai pengarang muda dan cantik yang

berasal dari kelas menengah atas yang oleh media pun, karya mereka disebut sebagai *fragrant letters* atau sastra-wangi. Salah satu sisi yang berusaha ditampilkan oleh sastra wangi adalah tema yang menyingkap hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan, seperti penggunaan kata-kata vulgar (penis, vagina, orgasme, dan sejenisnya). Akan tetapi, bagi sebagian sastrawan dan para feminis, istilah sastra-wangi dinilai sebagai pelecehan dan sinisme yang bertujuan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dengan sastrawan laki-laki. Sebutan tersebut juga mengindikasikan adanya strategi yang dilakukan oleh patriarkis demi menciptakan dikotomi baik dan buruk dalam label hitam-putih karya sastra (Khristianto, 2008:12-13).

Kepada BBC News, psikiater sekaligus penulis Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa kesamaan yang dimiliki oleh para penulis perempuan sastra-wangi adalah konteks seks yang dituliskan secara bebas dengan alasan dan landasan kuat mengapa para penulis tersebut menuliskannya. Hal tersebut menunjukkan respon para penulis terhadap kehidupan modern (BBC News, 2003). Di sisi lain, Ayu Utami bersikukuh bahwa setiap karya sastra penulis perempuan itu berbeda satu sama lain. Persamaannya hanya terdapat pada latar belakang para penulis tersebut sebagai perempuan kota kelas menengah. Meskipun karya-karya sastra wangi menimbulkan banyak perdebatan, karena konteks seksualitas yang sangat bebas, para penulis menganggap bahwa karya mereka merupakan refleksi dari realitas kehidupan modern (Khristianto, 2008:15). Hal ini juga diungkapkan oleh seorang kritikus sastra Nur Zain Hae atau yang lebih dikenal sebagai Zen Hae, dimana para penulis sebenarnya menulis apa yang sebenarnya sedang terjadi, yang

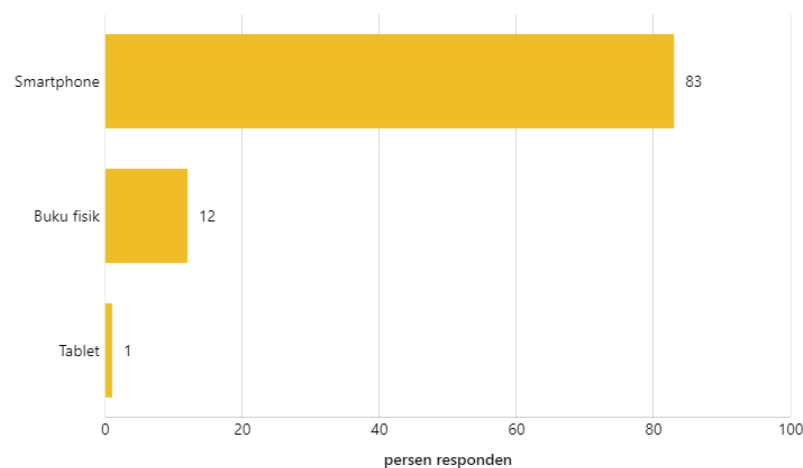
oleh generasi tua dianggap sebagai hal yang tabu (Lipscombe, 2003). Lewat sastrawangi, banyak pengarang perempuan yang juga menerapkan ideologi dan gaya bahasa serupa. Kebebasan sastrawangi dalam mendiskusikan seksualitas membawa kontroversi yang cukup alot diantara sastrawan maupun kritikus sastra. Bagi sebagian kritikus sastra, para pengarang sastrawangi ini terlalu berlebihan mengungkapkan seks dalam karya sastra. Beberapa dari mereka pun turut mempertanyakan kepantasan sastrawangi sebagai bagian dari karya sastra, Taufiq Ismail salah satunya. Baginya sastrawangi tidak lebih dari usaha perempuan-perempuan muda untuk mencabul-cabulkan sastra dengan mengumbar selangkangan wanita sebagai bahan dari halaman-halaman buku mereka. Sastrawan sekaligus wartawan senior Rosihan Anwar sepakat dengan menyebut bahwa sastrawangi bukanlah karya sastra yang wangi, melainkan “sastra mesum semata”. Sastrawangi dianggap sebagai fenomena sesaat untuk kepopuleran karya sastra mengenai tubuh perempuan yang ditulis oleh pengarang perempuan. Selain menitikberatkan pada diskusi seks dan tubuh perempuan, sastrawangi diyakini menjadi populer berkat kecantikan dan keseksian para penulisnya (Kompas.com, 2010). Kritik terhadap sastrawangi pun berlanjut, kini dengan tudingan bahwa sastrawangi hanyalah bentuk penetrasi kapitalisme ke dalam karya sastra. Seksualitas dan diskusi tubuh muncul sebagai tema, karena tengah diminati di pasaran. Pernyataan ini tidak sepenuhnya keliru, sebab sastrawan dan penulis Indonesia Fira Basuki menyebut bahwa seorang penulis tidak terlepas dari kepentingan penerbit. Artinya, penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang mereka tulis dituntut untuk laku di pasaran. Hal ini juga berarti bahwa sastrawangi

menjadi komoditas bagi media sebagai bahan berita yang tengah marak diperbincangkan. Sebab, kehadiran sastrawangi dianggap angin segar bagi penggerak feminis karena pada masa itu dunia sastra dan selera pasar didominasi oleh budaya maskulin. Alhasil, sepanjang tahun 2003 banyak buku nonsastra populer dan terbit dengan gemilang yang lahir dari zona “lampu merah”. Singkatnya, baik pengarang maupun karya sastra itu sendiri tidak terlepas dari dimensi pasar dan kapitalisme. Oleh karena itu, tema dan ideologi yang diadopsi pengarang ke dalam karya sastra bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan minat pasar.

## **2.2 Kapitalisasi Novel di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, terdapat 10 pelaku perbukuan, yang meliputi penulis, editor, penerjemah, penyadur, *illustrator*, *designer*, pencetak, pengembang buku elektronik atau *e-book*, penerbit, dan toko buku, sedangkan perpustakaan tidak termasuk ke dalam kategori ini, karena perpustakaan hanya dianggap sebagai perantara untuk menyebarluaskan buku kepada khalayak (Gunawan, 2023). Industri buku dan sastra tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi. Alhasil, buku pun mulai bertransformasi ke dalam bentuk digitalnya atau yang lebih dikenal sebagai *e-book*. Buku digital pertama kali muncul pada tahun 1998 dan disambut baik oleh sebagian masyarakat, karena dinilai praktis dan efisien (Nurbaiti, 2019:13). Sebab, orang-orang tidak perlu lagi membawa buku novel yang tebal, cukup melalui ponsel pintar atau gawai masing-masing. Beberapa aplikasi buku digital yang populer adalah Google Play Books, Innovel, Amazon Kindle, Goodreads, NovelPlus, Kobo Books,

dan sejenisnya. Akan tetapi, untuk menikmati buku bacaan atau novel pada aplikasi-aplikasi tersebut, pengguna harus mengeluarkan biaya tertentu. Misalnya saja untuk berlangganan perpustakaan melalui Amazon Kindle, pengguna dikenakan biaya 25 dolar atau setara dengan Rp387.000. Kendati demikian, E-book menjadi semakin digemari khalayak, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Rakuten Insight pada Maret 2023 lalu menunjukkan bahwa sebanyak 83 persen responden lebih sering membaca buku melalui *smartphone*. Sisanya, sebanyak 12 persen responden gemar membaca buku fisik dan 1 persennya senang membaca buku melalui tablet.



Gambar 2.2 Persentase survei mengenai media yang digunakan masyarakat Indonesia untuk membaca buku

*Sumber: Katadata*

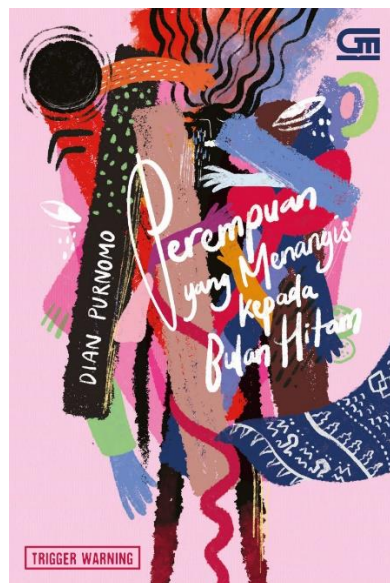
Angka ini jauh berbeda dengan Jepang yang sebagian besar masyarakatnya lebih senang membaca buku fisik, yakni dengan persentase 71 persen. Begitu pula dengan Korea Selatan yang mendapat persentase 62 persen untuk membaca buku fisik (Katadata, 2023).

Selain kebiasaan membaca, kapitalisasi buku dan novel di Indonesia juga ditandai dengan tren masif dalam dunia perbukuan Indonesia, yaitu munculnya penerbit-penerbit yang menawarkan jasa penerbitan buku dengan biaya yang sangat murah atau biasa disebut sebagai *print on demand*. Hal yang menarik adalah penerbit-penerbit ini bergerak dengan sangat gesit, sehingga banyak dari penerbit-penerbit tersebut yang bertransformasi menjadi penerbit mid-size dengan jumlah karyawan yang mencapai 100 orang. Disamping itu, banyak juga penerbit yang awalnya menerapkan strategi bisnis dengan mengakuisisi naskah menggunakan modal pribadi beralih dengan melibatkan pendanaan dari para penulis baru atau penulis yang tidak terkenal dalam menerbitkan buku mereka (Gunawan, 2023). Sebab, jika dilihat dari jumlah, para penulis baru ini sangatlah banyak, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengurangi penggunaan modal pribadi.

Perusahaan penerbit juga dapat mendapatkan banyak cerita baru melalui penulis-penulis baru melalui aplikasi penulisan online, seperti Gramedia Writing Project, JotterPad, hingga aplikasi populer Wattpad. Misalnya saja Wattpad yang telah banyak melahirkan penulis yang dapat menerbitkan bukunya secara fisik dan kemudian menjadi *best seller*, sebut saja Almira Bastari dengan karya best sellernya *Resign!* atau Mia Chuz dengan *Wedding Agreement* miliknya. Wattpad merupakan aplikasi menulis online yang diciptakan pada tahun 2006 oleh Allen Lau dan Ivan Yuen dan sukses dengan diakses lebih dari 90 juta pengguna di seluruh dunia (Al-Falaq, 2021:99). Besarnya peminat terhadap aplikasi tersebut telah melahirkan ledakan profit yang besar, karena buku-buku tersebut laris dipasaran dan menjadi karya *best seller* dengan oplah penjualan ratusan eksemplar.

### 2.3 Novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam

Novel ini merupakan karya seorang penulis Dian Purnomo yang dipublikasikan pada tahun 2020 lalu setelah dirinya menerima grant Residensi Penulis Indonesia pada tahun 2019 di Sumba.



Gambar 2.3 Cover Buku Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam

*Sumber: Gramedia*

Pada tahun terbitnya yakni pada tahun 2020, novel ini menjadi satu-satunya novel yang membahas isu perempuan. Kisah yang menjadi isu utama dari novel ini diangkat dari pengalaman nyata seorang perempuan di salah satu komunitas pelatihan menulis. Cerita tersebut pun dituliskan melalui platform online Goodreads dan telah dibaca lebih dari 200 kali pada akhir 2020 lalu. Mendapatkan ulasan 4.61 di Goodreads menjadikan novel ini sebagai salah satu novel tentang perempuan yang banyak direkomendasikan. Hingga saat ini, novel *Perempuan yang Menangis*



*kepada Bulan Hitam* telah mendapatkan 672 *reviews* dan 2.463 *ratings* di Goodreads.

Novel ini menggambarkan kisah Magi Diela, seorang sarjana Pertanian sebuah universitas di Yogyakarta. Tamat mengenyam pendidikan tinggi, Magi Diela lantas kembali ke tanah kelahirannya dengan membawa mimpi untuk membangun Sumba dengan gelar dan ilmunya. Mulai meniti karirnya, Magi Diela pun bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pertanian Waikabubak. Namun, impiannya terpaksa usai ketika Magi Diela menjadi korban kawin tangkap. *Yappa Mawine* atau yang lebih dikenal sebagai kawin tangkap merupakan pernikahan yang terjadi bukan atas dasar cinta atau suka, melainkan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Dalam banyak kasus, *yappa mawine* terjadi tanpa sepengetahuan perempuan. Perempuan yang menjadi korban kawin tangkap juga sulit untuk melakukan resistensi. Begitu pula dengan pihak keluarga korban yang terpaksa untuk menyerahkan anak perempuannya karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk menolak. Dengan kata lain, terdapat intimidasi hingga hasutan untuk segera menerima lamaran (Herman et al., 2023:2).

Sebagai korban kawin tangkap, Magi Diela hampir tidak punya pilihan selain menyerah, sebab keluarganya pun telah merelakan Magi Diela untuk dipersunting oleh pelaku. Akan tetapi, tekad kuat Magi Diela berhasil membawanya keluar dari Sumba demi menghindari prosesi pernikahan. Sayangnya, bagi masyarakat adat Sumba, perempuan yang melarikan diri justru mendapat stigmatisasi sebagai perempuan yang terbuang dan telah mencoreng nama baik

keluarga. Magi Diela pun semakin dihadapkan pada persoalan yang rumit, mulai dari konflik keluarga hingga pergulatan dengan diri sendiri.

Novel ini menarik untuk diteliti karena mengandung nilai-nilai kehidupan yang ditampilkan melalui resistensi perempuan Magi Diela dalam melawan struktur patriarki di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, novel ini juga sarat akan unsur budaya, seperti bahasa, kultur masyarakat, tradisi adat, dan lainnya yang merupakan kebiasaan asli masyarakat Sumba. Penulis juga memasukkan berbagai tradisi adat masyarakat Sumba seperti Wulla Poddu atau bulan hitam, Kalangngo, dan Mana'a. Sebagai detail untuk menambah kesan dalam cerita, Dian Purnomo, sebagai penulis menggunakan aksen Sumba untuk setiap kutipan maupun dialog, seperti *saya* menjadi *sa*, *kau* menjadi *ko*, atau *dia* menjadi *deng*. Novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* telah banyak menjadi bahan diskusi dan bedah buku dalam kelas-kelas feminis, pesta literasi Indonesia, hingga komunitas-komunitas buku di Indonesia. Untuk mendukung jalan cerita, novel ini juga menyertakan foto-foto yang dapat memberikan gambaran dan deskripsi kepada pembaca tentang Sumba atau masyarakat adatnya.

Hal menarik lainnya dari buku ini adalah cerita yang ditampilkan merupakan pengalaman nyata dari perempuan-perempuan Sumba yang menjadi korban kawin tangkap akibat tradisi dan adat pernikahan yang melemahkan perempuan dari kebebasan dan kemerdekaan diri. Dari kisah-kisah para perempuan inilah yang menggedor Dian Purnomo untuk menuangkannya dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* sekaligus wujud resistensi perempuan melawan struktur patriarki melalui sastra.

## **2.4 Gerakan Feminisme di Indonesia**

### **2.4.1 Sejarah Gerakan Feminisme di Indonesia**

Feminisme didefinisikan sebagai gerakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu agar dapat mengekspresikan diri mereka secara penuh tanpa memerdulikan gender maupun karakteristik identitas lainnya (Littlejohn et al., 2017:464). Oleh karena itu, feminisme cenderung dihubungkan dengan kombinasi gender, penindasan, dan penentuan nasib oleh kelompok itu sendiri.

#### **a. Era Kolonial Belanda**

Perjuangan perempuan Indonesia dimulai pada abad ke-19, tepatnya ketika era pemerintahan kolonial Belanda menguasai wilayah Indonesia. Bentuk perjuangan perempuan kala itu adalah melalui peperangan langsung melawan para penjajah. Beberapa nama besar tokoh perjuangan perempuan pada masa itu antara lain Christina Marta Tiahahu asal Maluku Tengah, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh, dan Nyai Ageng Serang atau yang dikenal juga sebagai Raden Ajeng Retno Kursiah asal Mataram. Selain berperang, perjuangan perempuan pada masa pendudukan Belanda adalah melalui pendidikan. Kebangkitan pergerakan perempuan di Indonesia tidak terlepas dari peran Nyai Achmad Dahlan (1872-1946) yang berhasil mendirikan pondok pesantren sebagai pusat latihan bagi santri dan ulama perempuan. Nyai Achmad Dahlan juga berjasa dalam mendirikan sekolah-sekolah umum bagi rakyat Indonesia. Selain pendidikan, Nyai Achmad Dahlan juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan. Hal ini dibuktikan melalui

dibentuknya organisasi Sopo Tresno pada tahun 1914 yang kemudian berganti nama menjadi Aisyiah pada tahun 1917.

Selain Nyai Achmad Dahlan, tokoh ternama yang menjadi pelopor pendidikan bagi perempuan adalah Raden Ajeng Kartini (1879-1904). Pendidikan yang dibangun oleh kartini, tidak semata untuk mencerdaskan perempuan, tetapi juga sebagai gerakan emansipasi perempuan dan menyejahterakan perempuan. Sebab dengan pendidikan, perempuan dapat memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kesamaan hak dengan laki-laki. Ide Kartini mengenai emansipasi perempuan melalui pendidikan dilanjutkan oleh Dewi Sartika (1884-1947) yang merupakan tokoh perempuan asal Jawa Barat. Pada usia sembilan tahun, Dewi Sartika terpaksa berhenti dari sekolahnya di *Europesche Lagere School (ELS)* karena ayahnya diasingkan ke Ternate setelah dituduh terlibat dalam percobaan pembunuhan Bupati Bandung R.A.A Martanegara dan beberapa pejabat Belanda di Bandung pada tahun 1893. Setelah pindah bersama pamannya, Dewi Sartika kembali mendapat pendidikan keterampilan perempuan hingga akhirnya ia berhasil mendirikan sekolah rakyat. Pada Januari 1904, dengan bantuan Bupati Bandung R.A.A Martanegara dan seorang warga Belanda, Dewi Sartika dapat mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan untuk belajar mengenai keterampilan perempuan, seperti memasak, membatik, menyulam, dan menjahit yang diberi nama *Sakola Isteri* dan pada tahun 1910 dirubah namanya menjadi *Sakola Kautamaan Isteri* (Aliyah, Komariah & Chotim, 2018:148-149).

Salah satu tokoh perjuangan perempuan pada masa kolonial Belanda lainnya adalah Rahmah El Yunusiyah (1901-1969) yang berhasil mendirikan

perguruan untuk perempuan yang diberi nama Diniyyah Puteri School Padang Panjang. Perguruan milik Rahmah tersebut bertujuan untuk membentuk sosok Ibu yang cakap, aktif, dan bertanggung jawab dalam mendidik anak dan mengurus keluarga dengan berdasar pada pandangan Islam. Tidak hanya berisikan murid asal Indonesia, perguruan ini juga memiliki murid dari luar Indonesia, seperti Malaysia dan Filipina. Dalam mengelola perguruanannya, Rahmah bepegang teguh pada politik non-kooperasi dengan menolak keras tawaran subsidi dari pemerintah Hindia-Belanda yang pada masa itu takut perguruanannya akan melahirkan tokoh-tokoh perjuangan. Disamping itu, perjuangan perempuan juga ditunjukkan melalui terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang bertujuan untuk mempertahankan nilai dan budaya asli dengan menolak paham budaya Barat yang dinilai tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Organisasi yang bermunculan pada tahun 1900an tersebut menjadi salah satu bentuk gerakan nasionalisme (Fauzia, 2022:865). Beberapa organisasi perempuan kala itu antara lain Pawijatan Wanito (Magelang, 1915), Aisyiah (1917), Poerborini (Tegal, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Poetri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Muljo (Yogyakarta, 1920), Wanito Katholik (Yogyakarta, 1924) (Ningrum, 2014:25). Adapun organisasi perempuan yang dinilai cukup vokal, karena berani memberikan mosi kepada Gubernur Jenderal tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum yaitu Poetri Mahardika (1912) yang merupakan bagian dari Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908. Organisasi ini berfokus pada perbaikan status sosial dan kedudukan perempuan dalam masyarakat.

#### b. Era Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, perempuan Indonesia tidak diberikan banyak kesempatan dan kebebasan yang amat terbatas. Oleh karena itu, gerakan perempuan seakan tidak terlihat, karena pemerintahan Jepang yang sangat ketat dalam pengawasannya. Gerakan perempuan pada era pendudukan Jepang didorong oleh adanya propaganda 3A yang diiringi dengan didirikannya gerakan Istri 3A dengan Ny. Artinah Syamsuddin sebagai pemimpinnya. Gerakan ini merupakan kumpulan dari para istri yang suaminya menjadi bagian dari kegiatan 3A. Bersamaan dengan berdirinya gerakan Istri 3A, dibentuk pula Barisan Putri Asia Raya. Selain itu, didirikan pula Perempuan PUTERA sebagai bagian dari organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada April 1943.

Sebagai wadah untuk menampung berbagai kegiatan perempuan, pemerintah Jepang pun membentuk organisasi perempuan yang diberi nama Fujinkai pada bulan Agustus 1943. Fujinkai dipimpin oleh istri-istri *kenko* atau bupati. Berdirinya Fujinkai menyebabkan organisasi perempuan pada masa penjajahan Belanda seperti Aisyiah dilarang untuk melakukan gerakan sosial. Hal ini memaksa Aisyiah untuk menyerahkan pemeliharaan anak yatim kepada Muhammadiyah. Oleh karenanya, pada masa itu, Fujinkai banyak mendapat pertentangan dari para aktivis perempuan Indonesia. Akan tetapi, Aisyiah tetap melakukan kegiatan secara diam-diam, seperti mengumpulkan infak dan sedekah yang diberikan untuk fakir miskin (Sondarika, 2017:214).

#### c. Era Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

Kekalahan Jepang atas sekutu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di deklarasikan, ketua Fujinkai Ny.

Sunaryo Mangunpuspito membubarkan organisasinya dan merubahnya menjadi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Hingga pada Desember 1945, dibentuk organisasi perempuan yang diberi nama Pemuda Puteri Indonesia (PPI). Organisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pemuda agar menjadi warga negara penuh yang siap memiliki tanggung jawab dalam pembangunan negara layaknya laki-laki. PPI juga mengajarkan kepada anggotanya mengenai cara menggunakan hak-hak politik, sebab di awal periode kemerdekaan Indonesia inilah, para perempuan kembali menyuarakan persamaan hak politik dan jaminan hukum. Gerakan perempuan ini membuahkan hasil, dimana perempuan mendapatkan haknya atas politik dan jaminan hukum layaknya laki-laki melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari penjajah. Kedatangan sekutu yang diboncengi NICA mendorong para perempuan untuk mendirikan organisasi yang diberi nama Wanita Republik Indonesia (WANI) dengan Ny. Suwani Pringgodigdo dan Nn. Emma Djajadiningrat sebagai pimpinanya. Organisasi ini dibentuk sebagai dapur umum yang menampung korban kebakaran akibat pembakaran yang dilakukan oleh NICA dan tugas-tugas sosial lainnya. Disamping itu, berdiri sebuah federasi perempuan bernama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) untuk menyokong kemerdekaan Indonesia. Federasi ini pun menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia di Klaten pada Desember 1945. Pada tanggal 24-26 Februari 1946, Kowani kembali menggelar konferensi di Solo dengan tujuan untuk menghubungkan perkumpulan perempuan dalam Kongres Wanita Indonesia di Klaten lalu. Pada masa-masa ini,

para perempuan mulai banyak menyuarkan tuntutan mereka, mulai dari persamaan ha katas upah, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan bagi perempuan, dan lain sebagainya (Wieringa, 2010:29). Atas tuntutannya tersebut, perempuan pun diberikan hak pilih dalam Pemilihan Umum 1955 sekaligus berhak untuk duduk di kursi parlemen. Akan tetapi pada masa Pemilu ini, gerakan perempuan Indonesia perlahan mulai hancur. Diawali dengan adanya ketegangan antara kelompok perempuan Islam dengan kelompok perempuan nasionalis, munculnya beragam aktivitas seperti balai, bank, hingga surau perempuan. Di sisi lain, banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai politik, organisasi pejabat, maupun gerakan keagamaan laki-laki.

Tahun-tahun setelah 1950an, ketegangan yang melibatkan dua organisasi perempuan besar pun terjadi, yaitu antara organisasi perempuan Islam, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dengan golongan perempuan nasionalis, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Hal ini terjadi karena terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antar kedua organisasi tersebut. Pertama, Gerwani merupakan organisasi yang sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan borjuis, seperti para istri kaum intelektual maupun birokrat yang menjadi pengikut Presiden Soekarno. Sedangkan Perwari menjadi rumah perkumpulan bagi masyarakat lapisan menengah bawah hingga perempuan kelas buruh. Kedua, Perwari menolak keras poligami dalam perkawinan yang terjadi dalam praktik pernikahan poligami Soekarno pada tahun 1954. Disisi lain, Gerwani tidak terlalu mempermasalahkan isu poligami tersebut. Hingga pada tahun 1958, para anggota Gerwani mendesak Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang saat itu menjadi



lembaga untuk mengkoordinasi semua organisasi perempuan di Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antara organisasi-organisasi golongan kiri. Sebagai tindak lanjut atas permintaan Gerwani, dibentuklah Gerakan Massa. Gerwani bersama dengan organisasi kiri lainnya juga menginginkan KWI untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Akan tetapi, beberapa pengurus KWI merasa bahwa usaha-usaha tersebut merupakan bentuk infiltrasi Gerwani, sehingga KWI pun memutuskan untuk membubarkan Gerakan Massa. Hasilnya, KWI pun mengalami perselisihan dengan organisasi golongan kiri. Polarisasi ini pun berdampak pada semakin memuncaknya ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Hingga pada kongres 1964, KWI kembali menggunakan nama lamanya yaitu Kowani yang diketuai oleh Ny. Subandrio, tokoh perempuan nasionalis berhaluan kiri. Alhasil, Kowani pun terus menganut paham-paham nasionalis kiri.

#### d. Era Orde Baru

Era kepemimpinan Soeharto menjadi titik lemah bagi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Kemunduran ini diawali dengan dikeluarkannya Gerwani dari Kowani pada akhir Oktober 1965. Hal ini terjadi karena Gerwani dianggap terlibat dalam gerakan komunis, sehingga Gerwani menjadi organisasi yang terlarang. Akan tetapi, pengaruh kiri Kowani sulit untuk dihapuskan. Terbukti dengan tetapi diperingatinya Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret yang berlanjut hingga tahun 1966. Setelah Gerwani dinyatakan terlarang, pemerintah Orde Baru memaksa semua organisasi untuk menyesuaikan diri. Alhasil, sebagian besar program sosial dan ekonomi yang melibatkan perempuan menengah kebawah

dan perempuan kelas miskin pun terpaksa dihapuskan. Pemerintahan Orde Baru juga berusaha untuk menyingkirkan paham dan unsur-unsur kiri dari semua organisasi perempuan kala itu. Salah satu organisasi perempuan yang mengalami pembersihan ini adalah Perwari, dimana pemerintah memaksa anggota maupun pengurus organisasi yang merupakan isteri pejabat atau tokoh nasional untuk mengundurkan diri. Sebagai organisasi islam, Perwari terus menerus mendapat tekanan politik dari pemerintah, hingga akhirnya Perwari dilebur dengan partai pemerintah Golongan Rakyat (Golkar) pada tahun 1978. Hal ini menyebabkan organisasi perempuan besar kehilangan independensinya. Sebagai ganti, pemerintah membentuk beberapa organisasi perempuan baru, seperti Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri sipil, Dharma Pertiwi untuk istri anggota angkatan bersenjata, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Wieringa, 2010:33).

Dibatasinya gerak organisasi perempuan masa pemerintahan Orde Baru mendorong perempuan untuk memunculkan gerakan perempuan lain oleh para aktivis perempuan pada tahun 1970-1980 sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Gerakan ini berhasil membawa perempuan Indonesia untuk mengikuti berbagai konferensi perempuan yang ada di dunia, salah satunya adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Perwakilan Indonesia kala itu, Suwarni Salyo berhasil merumuskan 1 pasal yaitu pasal (14) mengenai kewajiban negara terhadap perempuan pedesaan yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1984.

e. Era Reformasi

21 Mei 1998 menjadi petanda runtuhnya rezim Soeharto, tepatnya setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya yang disusul dengan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Era ini membangkitkan kembali peran aktivis perempuan dalam membela kepentingan perempuan Indonesia. Berbagai organisasi LSM pun bermunculan, seperti Urban Poor Consortium (UPC) yang digagas oleh Wardah Hafiz bersama rekan-rekannya pada tahun 1997 atau kelompok Suara Ibu Peduli yang kala itu menyuarakan keprihatinan kaum perempuan atas tingginya harga kebutuhan pokok (Aripurnami, 2013:223). Perjuangan perempuan pasca Orde Baru terlihat dari keikutsertaan perempuan dalam pembuatan instrumen hukum, terlebih dalam kebijakan yang menyangkut keadilan dan persamaan hak perempuan. Perjuangan perempuan ini membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut, terbentuk pula Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selain keadilan dan kesetaraan perempuan, era reformasi juga mendai perjuangan perempuan dalam pemikiran feminisme islam. Lahirnya feminisme islam didorong karena meningkatnya angka masyarakat Indonesia yang menempuh studi di negara-negara timur untuk mempelajari agama Islam (Fauzia, 2022:874-875).

#### **2.4.2 Isu dan Gerakan Feminisme di Indonesia**

Era reformasi menjadi titik terang bagi perjuangan perempuan Indonesia pasca Orde Baru yang serba membatasi gerak perempuan. Perubahan secara dramatis dalam segala bidang, baik sosial, politik, maupun agama ikut menyumbang andil bagi berkembangnya gerakan-gerakan perempuan. Akan tetapi, perjuangan

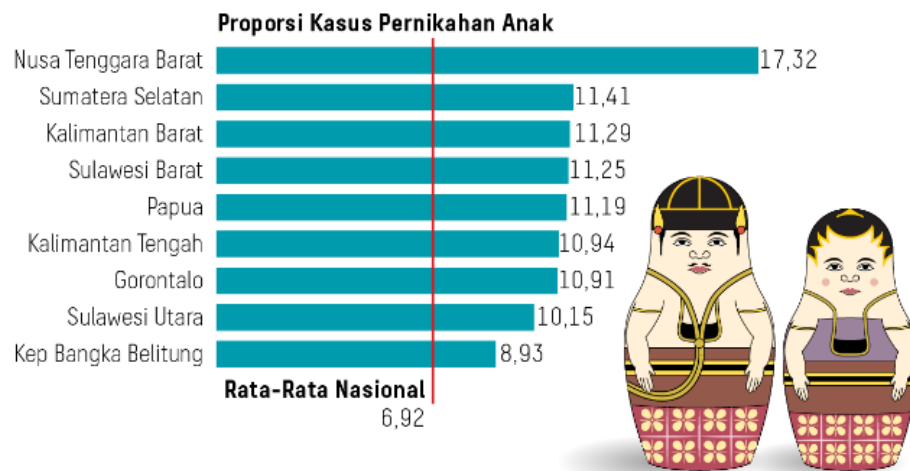
perempuan Indonesia tidak berhenti disini. Pasca reformasi pun, perempuan Indonesia masih dihadapkan dengan pelbagai permasalahan gender, mulai dari ketimpangan gender, domestifikasi perempuan, kekerasan seksual, hingga pemaksaan perkawinan. Salah satu bentuk pemaksaan perkawinan adalah praktik kawin tangkap. Perempuan Indonesia masih dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa praktik kawin tangkap masih menjadi tradisi dan budaya yang langgeng di Sumba. Sebagaimana dilansir dari Detik.com, Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) menunjukkan bahwa terdapat 20 kasus kawin tangkap yang terjadi di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, seperti Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah pada tahun 2013 hingga 2023. Lebih lanjut, SOPAN mengungkapkan bahwa rata-rata perempuan yang menjadi korban kawin tangkap berasal dari golongan umur 13 hingga 30 tahun. Tidak sedikit pula, korban kawin tangkap merupakan remaja berusia 13, 16, dan 17 tahun (Bria, 2023).

Sebagaimana dikutip dari Magdalene.co, Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia (PERUATI) juga mengumpulkan data kasus kawin tangkap. Dalam data yang berhasil dikumpulkan terdapat tujuh kasus kawin tangkap yang terjadi dalam rentang tahun 2016 hingga 2020. Angka tersebut belum mencakup kasus kawin tangkap yang tidak dilaporkan. Akan tetapi, dari tujuh kasus tersebut, hanya lima kasus yang dapat diselesaikan, sedangkan dua lainnya terpaksa menikah di bawah tekanan. Selain PERUATI, Romo Paulus Dwiyanarta dari Kantor Bantuan Hukum Sarnelli Redemptoris menunjukkan terdapat empat kasus kawin tangkap di Sumba hanya pada tahun 2020. Salah satu kasusnya melibatkan seorang remaja berusia 18 tahun yang

berhasil kabur setelah ditahan selama tiga hari di kediaman pelaku. Lebih lanjut, Romo Paulus Dwiyanarta menyatakan bahwa di tahun 2017 terdapat seorang anak berusia 13 tahun asal Kabupaten Sumba Tengah yang menjadi korban kawin tangkap. Tidak hanya ditahan, korban juga mengalami kekerasan seksual dengan cara diperkosa berulang kali selama tiga hari oleh pelaku. Mirisnya, terdakwa tidak mendapatkan hukuman karena dianggap sebagai bagian dari adat dan tradisi (Ariani, 2021).

Praktik yang melibatkan anak di bawah umur ini pun lantas menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengklasifikasikan kawin tangkap sebagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan budaya. Sebab dalam praktiknya, korban juga mengalami beragam bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, sosial, hingga emosional. Dilansir dari Kompas.id, ratusan ribu anak menikah pada usia di bawah 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data pernikahan anak di bawah umur selama 10 tahun terakhir yang terus terjadi. Bahkan, setiap tahunnya, pernikahan anak di bawah umur mencapai 10,5 persen. Nusa Tenggara Barat menyumbang 17,32 persen dalam perkawinan usia anak dan menjadikannya provinsi dengan perkawinan anak di bawah umur tertinggi, disusul oleh Sumatera Selatan dengan 11,41 persen dan Kalimantan Barat dengan 11,29 persen.

### Sepuluh Provinsi dengan Kasus Pernikahan Anak Terbanyak



Gambar 2.4 Sepuluh provinsi dengan kasus pernikahan anak terbanyak

*Sumber: Kompas.id*

Angka ini diperkuat dengan data United Nations Children's Fund (UNICEF) 2023 yang menyebut bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dengan jumlah 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus pernikahan usia anak terbanyak di ASEAN (Budianto, 2024). Beragam upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, salah satunya melalui amandemen Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia menikah dari 18 tahun menjadi 19 tahun. Akan tetapi, perubahan ini belum membawa dampak yang signifikan dalam mengurangi kasus pernikahan anak di bawah umur. UNICEF menjelaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur lebih rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (UNICEF, 2020).

Selain menjadi perhatian KPAI, praktik kawin tangkap yang melibatkan anak-anak di bawah umur juga menjadi kasus yang disorot oleh Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 tentang Kekerasan

terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 menunjukkan bahwa kawin tangkap merupakan bentuk kekerasan yang mengatasnamakan budaya. Berdasarkan aduan kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan, pelaku mengaku bahwa kawin tangkap sudah menjadi tradisi di Sumba yang didukung dan dibenarkan oleh konstruksi masyarakat Sumba sendiri. Akan tetapi, Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kawin tangkap termasuk sebagai tindak pelanggaran, karena tidak adanya kebebasan dari korban untuk membuat keputusan, baik ketika diculik maupun ketika dipaksa untuk menikah (Komnas Perempuan, 2021).

Tidak hanya di Sumba, pernikahan dengan menculik perempuan juga dipraktikkan di beberapa suku di Indonesia, seperti suku Osing di Banyuwangi dan suku Sasak di Lombok. Persamaan ketiganya terletak pada cara pelaku (laki-laki) memperlakukan korban agar menerima lamaran pernikahan, yaitu dengan menculik atau membawa lari korban (perempuan). Alhasil, banyak dari perempuan tersebut yang terpaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukai atau bahkan tidak dikenalnya. Dalam tradisi suku Sasak, budaya kawin tangkap atau kawin culik ini disebut dengan “merariq”. Masyarakat Sasak percaya bahwa melamar seorang perempuan merupakan bentuk penghinaan terhadap keluarga calon istri, karena dianggap menyamakan anak perempuannya dengan benda atau barang yang ditawarkan. Dalam kebanyakan kasus pernikahan adat suku Sasak, kawin culik terjadi karena syarat yang diajukan oleh keluarga perempuan sulit untuk dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Disamping itu, banyak laki-laki yang khawatir apabila lamarannya akan ditolak oleh keluarga perempuan karena beberapa alasan, status sosial misalnya, sehingga ketidaksiapan psikologis inilah yang menjadi alasan bagi

laki-laki Sasak untuk memilih jalan kawin culik (Hamsun & Aminulloh, 2017). Lebih lanjut, budaya Sasak menghendaki laki-laki yang akan melakukan kawin culik untuk membawa lari perempuan di malam hari tanpa sepengetahuan keluarga perempuan untuk kemudian dibawa ke rumah pelaku. Apabila penculikan tersebut diketahui oleh keluarga perempuan, maka akan dianggap gagal dan pihak laki-laki diharuskan untuk membayar denda.

Dalam masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Lombok, kawin culik bukan lagi hal baru, bahkan telah menjadi praktik yang terlembaga secara adat. Untuk melangsungkan pernikahan dalam adat Sasak, terdapat beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Pertama, perempuan dan laki-laki yang memiliki perasaan suka sama suka akan menculik perempuan yang dicintainya dan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan perundingan bersama. Kedua, perempuan yang dibawa lari harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak, mencuci, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Perempuan juga diharuskan untuk bisa menenun untuk membuktikan bahwa seorang perempuan Sasak dapat bersikap mandiri dan tidak bergantung pada suaminya. Ketiga, laki-laki Sasak juga diharuskan untuk memiliki keahlian di bidang pertanian agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga (Mispani & Fahrurrozi, 2021). Persyaratan tersebut cukup untuk menunjukkan posisi perempuan dalam masyarakat, yaitu tidak lebih dari seorang istri dan ibu. Oleh karenanya, dalam aturan pernikahan Suku Sasak, perempuan tidak diharuskan untuk berpendidikan atau memiliki usia yang matang. Bagi masyarakat adat Sasak, kawin culik menjadi simbol kejantanan dan maskulinitas. Sebab, laki-laki yang berani mengambil risiko



dengan membawa lari perempuan yang disukainya dianggap sebagai pemberani dan orang yang berwibawa. Hal ini terjadi karena masyarakat Sasak mengadopsi budaya patriarki, dimana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan sejajar.

Berbeda dengan kawin tangkap masyarakat adat Sumba atau kawin culik suku Sasak, kawin colong dalam budaya suku Osing terjadi karena laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk menikah. Dalam beberapa kasus, kebanyakan kawin colong terjadi karena adanya keinginan dari laki-laki atau perempuan untuk menikah muda meskipun belum tuntas menyelesaikan masa studinya atau terjadi sebagai bentuk penolakan perempuan yang akan dijodohkan dengan orang yang tidak disukainya. Tidak jarang kawin colong ini terjadi karena perbedaan status sosial antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan (Aifah, 2023). Serupa dengan bentuk kawin tangkap atau kawin culik, kawin colong juga didahului dengan proses menculik atau membawa lari perempuan ke kediaman laki-laki. Setelah itu, pihak laki-laki akan mengirim colok (juru bicara) kepada keluarga perempuan untuk mengabarkan bahwa anak perempuannya telah diculik oleh pelaku, sehingga keluarga perempuan dapat segera menerima lamaran pernikahan agar tidak menimbulkan aib bagi keluarga. Bahkan ketika sudah menikah, perempuan Osing tidak dilarang untuk tinggal jauh dari Desa tempat kelahirannya dan dituntut untuk tinggal berdekatan dengan orang tuanya. Bagi Suku Osing, hal ini bertujuan untuk melindungi anak perempuan mereka. Selain itu, perempuan Osing juga diperlakukan layaknya perempuan dalam budaya patriarki, dimana posisi mereka sangat sempit dan terbatas sebagai istri dan ibu. Perempuan Osing diharuskan untuk berfokus pada urusan di ranah domestik, misalnya saja tradisi

“mepe kasur”, dimana para perempuan Osing secara bersama-sama menjemur kasur di depan rumah dari pagi hari hingga sore hari (Lestari, 2021).

Perbedaan kawin culik dan kawin colong dengan kawin tangkap adalah dalam kebanyakan kasus kawin tangkap, terdapat kesepakatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan mengenai perkawinan, akan tetapi korban perempuan tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Ketika keluarga perempuan memutuskan untuk mengingkari kesepakatan, maka terjadilah praktik kawin tangkap tersebut. Kawin tangkap dianggap sebagai solusi untuk mempertahankan nama baik dan mengangkat derajat keluarga laki-laki. Sebab, masyarakat adat Sumba masih berpegang teguh pada ajaran dan budaya patriarki, sehingga kawin tangkap pun menjadi cara untuk mengatasi rasa malu karena kesepakatannya dibatalkan oleh keluarga perempuan secara sepihak (Tanggu, 2024:190). Meskipun kawin tangkap telah menjadi tradisi dan budaya turun temurun, KPAI berpendapat bahwa budaya haruslah bersifat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman, sehingga budaya yang tidak memanusiakan manusia dan mengandung unsur kekerasan dalam bentuk apapun perlu dikoreksi atau ditinggalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah Sedaratan Sumba membuat kesepakatan mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sedaratan Sumba. Kesepakatan tersebut mendeklarasikan bahwa kawin tangkap tidak lagi menjadi budaya masyarakat Sumba. Lebih lanjut, KPAI mendesak empat kabupaten di Sumba, yang meliputi Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur

untuk membuat kebijakan teknis mengenai pencegahan kawin tangkap dan penanganan korban kawin tangkap.

Berdasarkan pernyataan dan data diatas, kawin tangkap masih menjadi isu serius yang perlu dituntaskan di Indonesia. Terlebih ketika pelaksanaan kawin tangkap yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini telah melenceng jauh dari prosedur adatnya. Para laki-laki dengan bebas dan berani membawa paksa perempuan atau menculikanya untuk kemudian dinikahi dengan dalih tradisi atau adat. Perubahan tradisi ini merupakan salah satu dampak dari konstruksi gender yang tidak setara dalam budaya patriarki, dimana laki-laki selalu mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada perempuan. Disamping itu, patriarki melahirkan pemahaman yang keliru, dimana maskulinitas laki-laki diidentikkan dengan dominasi, ego, atau kekerasan. Alhasil, ajaran ini membuat masyarakat memiliki pola pikir yang melegitimasi kekerasan. Untuk mencegah dampak dari praktik kawin tangkap yang telah menjadi budaya dan tradisi masyarakat adat selama ini, maka media massa digunakan sebagai sarana untuk merekonstruksi pola pikir masyarakat terhadap fenomena tersebut. Novel menjadi salah satu bentuk media massa untuk menarasikan isu kawin tangkap tersebut. Adapun isu kawin tangkap dan resistensi perempuan ditampilkan dalam novel bertajuk *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* karya Dian Purnomo